

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Data Dan Sampel**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diambil langsung dari kantor (BPK-RI. Perwakilan Provinsi Lampung) dan melalui situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yaitu [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). Populasi yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2017-2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling, yaitu pemilihan sampel secara acak dengan probabilitas yang sama.

**Tabel 4.1**  
**Sampel Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Tanggal Peresmian
1	Kab. Lampung Barat	16 Agustus 1991
2	Kab. Lampung Selatan	14 November 1954
3	Kab. Lampung Tengah	21 Juni 1945
4	Kab. Lampung Utara	15 Juni 1946
5	Kab. Lampung Timur	27 April 1999
6	Kab. Tanggamus	21 Maret 1997
7	Kab. Tulang Bawang	20 Maret 1997
8	Kab. Way Kanan	27 April 1999
9	Kota Bandar Lampung	17 Juni 1682
10	Kota Metro	09 Juni 1999
11	Kab. Pesawaran	02 November 2007
12	Kab. Pringsewu	29 Oktober 2008
13	Kab. Mesuji	03 April 2009
14	Kab. Tulang Bawang Barat	03 April 2009
15	Kab. Pesisir Barat	16 November 2012

#### **4.1.2 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Pengukuran nilai rata-rata (mean) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data, sedangkan standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Financial Distress	45	0	1	,22	,420
Kemandirian Keuangan	45	,0274	,2864	,080956	,0665453
Kontribusi PAD	45	,0268	,2944	,076940	,0638917
Jumlah Penduduk	45	18,8429	20,9711	19,933047	,6676310
Umur Administratif	45	5	337	47,73	81,094
Luas Wilayah	45	4,2303	8,5802	7,434100	1,2074776
Keselarasan Belanja	45	,5909	2,4723	1,314376	,4620317
Valid N (listwise)	45				

Sumber: data diolah SPSSV20, 2021.

Berdasarkan dari tabel di atas, menyajikan hasil uji statistik deskriptif untuk setiap variabel dalam penelitian dan menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan sampel (N) sebanyak 45. Variabel kemandirian keuangan menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0274 pada Kab. Tulang Bawang Barat tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 0,2864 pada Kota Bandar Lampung tahun 2019. Nilai rata rata sebesar 0,0809 dengan standat devisiasi 0,0665. Sedangkan variabel kontribusi pendapatan asli daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0268 pada Kab. Tulang Bawang Barat tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 0,2944 pada Kota Bandar Lampung tahun 2017. Nilai rata rata sebesar 0,076 dengan standar devisiasi sebesar 0,0638.

Variabel LN\_jumlah penduduk menunjukkan nilai minimum sebesar 18,84 pada Kab. Pesisir Barat tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 20,97 pada Kab. Lampung Tengah tahun 2019. Nilai rata rata sebesar 19,93 dengan standar devisiasi sebesar 0,6676. Sedangkan variabel umur administratif menunjukkan nilai minimum sebesar 5 pada Kab. Pesisir Barat tahun 2017 dan nilai maksimum

sebesar 337 pada Kota Bandar Lampung tahun 2019. Nilai rata rata sebesar 47,73 dengan standar deviasi sebesar 81,094.

Variabel LN\_luas wilayah menunjukkan nilai minimum sebesar 4,230 pada Kab. Pesisir Barat tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 8,580 pada Kab. Lampung Timur tahun 2019. Nilai rata rata sebesar 7,234 dengan standar deviasi sebesar 1,207. Sedangkan variabel keselarasan belanja menunjukkan nilai minimum sebesar 0,5909 pada Kota Metro tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 2,4723 pada Kab. Tanggamus tahun 2018. Nilai rata rata sebesar 1,314 dengan standar deviasi sebesar 0,4620.

Berdasarkan hasil statistic deskriptif Variabel *financial distress* menunjukkan nilai rata rata sebesar 0,22 dengan standar deviasi sebesar 0,420. Artinya Kabupaten/Kota Se-Lampung berada pada kondisi *financial distress* karena tingkat belanja modalnya kurang dari target pemerintah pusat sebesar 30 persen. Sedangkan jika dilihat dari semua variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai standardeviasilebih kecil daripada nilai rata-rata artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang cukup baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata semua variabel penelitian yang menunjukkan bahwa data variabel mengindikasikan hasil yang cukup baik, hal tersebut dikarenakan standart deviation yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut cukup tinggi karena lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

#### **4.2 Uji Regresi Logistik**

Menurut Ghozali (2019) regresi logistik hampir serupa dengan analisis diskriminan yaitu untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Namun demikian asumsi multivariate normal distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel independen merupakan campuran antara variabel metrik dan non metrik. Untuk itu tidak diperlukan asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Jadi regresi logistik umum

digunakan jika asumsi multivariate normal distribution tidak dipenuhi. Pengujian hipotesis mengenai faktor yang mempengaruhi prediksi financial distress dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik karena penyajian data pengungkapan kompensasi dalam bentuk variabel *dummy*.

**Tabel 4.3**  
**Uji Regresi Logistik**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.
X1	39,767	20,131	3,902	1	,048
X2	-184,989	84,990	4,738	1	,030
X3	-4,632	2,182	4,506	1	,034
Step 1 <sup>a</sup> X4	,122	,056	4,768	1	,029
X5	-2,212	1,799	1,513	1	,219
X6	5,337	2,502	4,549	1	,033
Constant	103,352	47,514	4,731	1	,030

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6.

Sumber: data diolah SPSSV20, 2021.

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan melihat nilai estimasi parameter dalam *variables in the equation* adalah sebagai berikut :

$$\text{DSCR} = 103,352 + 39,767(\text{KK}) - 184,989(\text{PAD}) - 4,632(\text{JP}) + 0,122(\text{UA}) - 2,212(\text{LW}) + 5,337(\text{KB})$$

Berdasarkan model diatas, untuk menginterpretasikan hasil analisis tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 103,352 arti tanda positif adalah apabila semua variabel independen yaitu kemandirian keuangan, kontribusi pendapatan asli daerah, kompleksitas jumlah penduduk, umur administratif, luas

wilayah, dan keselarasan belanja bernilai nol atau konstan maka *financial distress* mengalami peningkatan sebesar 103,352.

2. Koefisien regresi kemandirian keuangan sebesar 39,767 artinya kemungkinan Pemerintah Daerah akan menggunakan *financial distress* adalah sebesar 39,767 untuk setiap kenaikan 1 satuan kemandirian keuangan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
3. Koefisien regresi kontribusi PAD sebesar -184,989 artinya kemungkinan Pemerintah Daerah akan menggunakan *financial distress* adalah sebesar -184,989 untuk setiap kenaikan 1 satuan kontribusi PAD dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
4. Koefisien regresi kompleksitas jumlah penduduk sebesar -4,632 artinya kemungkinan Pemerintah Daerah akan menggunakan *financial distress* adalah sebesar -4,632 untuk setiap kenaikan 1 satuan kompleksitas jumlah penduduk dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
5. Koefisien regresi umur administratif sebesar 0,122 artinya kemungkinan Pemerintah Daerah akan menggunakan *financial distress* adalah sebesar 0,122 untuk setiap kenaikan 1 satuan umur administratif dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
6. Koefisien regresi luas wilayah sebesar -2,212 artinya kemungkinan Pemerintah Daerah akan menggunakan *financial distress* adalah sebesar -2,212 untuk setiap kenaikan 1 satuan luas wilayah dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
7. Koefisien regresi keselarasan belanja sebesar 5,337 artinya kemungkinan Pemerintah Daerah akan menggunakan *financial distress* adalah sebesar 5,337 setiap kenaikan 1 satuan keselarasan belanja dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

#### **4.4 Pengujian Hipotesis**

##### **4.4.1 Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)**

*Hosmer and Lemeshow Test* digunakan untuk menguji apakah data empiris cocok atau sesuai dengan model yaitu tidak ada perbedaan antara model dengan data

sehingga model dapat dikatakan fit. Apabila nilai signifikansi *Hosmer dan Lemeshow's goodness of fit statistic*  $\geq 0,05$  artinya model dapat memprediksi nilai observasinya atau bisa dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

**Tabel 4.4**

***Hosmer Dan Lemeshow's Goodness Of Fit Statistic***

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	3,227	7	,863

Sumber: data diolah SPSSV20, 2021.

Berdasarkan pengujian *Hosmer and Lemeshow Test* untuk menguji kelayakan model yang tersaji pada Tabel 4.4. ditemukan nilai *Chi-Square* sebesar 3,227 dengan nilai signifikansi 0,863 yang nilainya jauh di atas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat diterima dan layak digunakan untuk melanjutkan pengujian dalam penelitian ini karena cocok dengan data-data observasinya.

**4.4.2 Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)**

Menilai Keseluruhan Model (*overall model fit test*) adalah untuk menilai keseluruhan model regresi. *Overall fit test* diuji dengan menggunakan nilai *-2 log likelihood* atau *uji omnibus test*. Nilai *-2 log likelihood* menunjukkan penurunan angka kecocokan berdasarkan model iterasi yang dilakukan. Nilai *-2 log likelihood* yang turun cukup besar menunjukkan bahwa model akan semakin fit.

**Tabel 4.5**

***Overall Model Fit Test***

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
-----------	-------------------	--------------

		Constant
1	47,834	-1,111
2	47,674	-1,248
3	47,674	-1,253
4	47,674	-1,253

Sumber: data diolah SPSSV20, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai  $-2\text{LogL}$  ( $-2\text{LL}$ ) pada awal (Block 0) dengan nilai  $-2\text{LogL}$  pada akhir (Block 1). Adanya pengurangan nilai antara  $-2\text{LL}$  awal (initial  $-2\text{LL}$  function) dengan nilai  $-2\text{LL}$  pada langkah berikutnya ( $-2\text{LL}$  akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. Bukti bahwa penurunan nilai  $-2$  likelihood merupakan pengujian yang mengarah bentuk model yang fit dapat dilihat dari nilai *chi square*) pada *omnibus test of model coefficient*

**Tabel 4.6**  
***Omnibus Test Of Model Coefficient***

	Chi-square	Df	Sig.
Step	27,392	6	,000
Step 1 Block	27,392	6	,000
Model	27,392	6	,000

Sumber: data diolah SPSSV20, 2021.

Berdasarkan hasil *Omnibus Test of Model Coefficient* yang disajikan dalam Tabel 4.6. diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Apabila nilai signifikansi dari hasil *Omnibus Test of Model Coefficient* dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% maka tentunya nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini layak untuk digunakan dan penggunaan variabel independen dalam model penelitian ini secara simultan dapat memprediksi variabel dependennya.

#### 4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Untuk menguji sejauh mana variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya digunakan koefisien determinasi. Pengujian ini dilakukan berdasarkan pada nilai *Nagelkerke R Square*. *Nagelkerke R Square* merupakan modifikasi dari *koefisien Cox and Snell R Square* yang mana untuk memastikan bahwa nilainya adalah bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Pengujian koefisien determinasi dijelaskan oleh nilai *Nagelkerke R Square* dalam Tabel 4.7. sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
*Nagelkerke R Square*

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	20,282 <sup>a</sup>	,456	,698

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: data diolah SPSSV20, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,698. Hal ini mengandung arti bahwa variabel dependen yaitu *financial distress* dipengaruhi sebesar 69,8% oleh variabel independennya yaitu kemandirian keuangan, kontribusi pendapatan asli daerah, kompleksitas jumlah penduduk, umur administratif, luas wilayah, dan keselarasan belanja, sedangkan sisanya sebesar 30,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

#### 4.4.4 Uji Hipotesis (*Wald*)

Setelah mendapatkan model regresi logistik yang fit yang tidak memerlukan modifikasi model, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan. Hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji secara parsial. Pengujian kemaknaan

prediktor secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji Wald dan dengan pendekatan chi square diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Uji Hipotesis**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.
X1	39,767	20,131	3,902	1	,048
X2	-184,989	84,990	4,738	1	,030
X3	-4,632	2,182	4,506	1	,034
Step 1 <sup>a</sup> X4	,122	,056	4,768	1	,029
X5	-2,212	1,799	1,513	1	,219
X6	5,337	2,502	4,549	1	,033
Constant	103,352	47,514	4,731	1	,030

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6.

Sumber: data diolah SPSSV20, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pengujian secara individual atau uji wald sebagai berikut:

1. Variabel kemandirian keuangan menunjukkan nilai Wald sebesar 3,902 dengan signifikansi sebesar 0,048. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh signifikan kemandirian keuangan terhadap *financial distress*.
2. Variabel kontribusi PAD menunjukkan nilai Wald sebesar 4,738 dengan signifikansi sebesar 0,030. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh signifikan kontribusi PAD terhadap *financial distress*.
3. Variabel kompleksitas jumlah penduduk menunjukkan nilai Wald sebesar 4,506 dengan signifikansi sebesar 0,034. Nilai signifikansi yang berada di

bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh signifikan kompleksitas jumlah penduduk terhadap *financial distress*.

4. Variabel umur administratif menunjukkan nilai Wald sebesar 4,768 dengan signifikansi sebesar 0,029. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya signifikan pengaruh umur administratif terhadap *financial distress*.
5. Variabel luas wilayah menunjukkan nilai Wald sebesar 1,513 dengan signifikansi sebesar 0,219. Nilai signifikansi yang berada di atas 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh luas wilayah terhadap *financial distress*.
6. Variabel keselarasan belanja menunjukkan nilai Wald sebesar 4,549 dengan signifikansi sebesar 0,033. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya signifikan pengaruh keselarasan belanja terhadap *financial distress*.

## **4.5 Pembahasan**

### **4.5.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap *Financial Distress***

Berdasarkan uji regresi logistik menunjukkan bahwa, kemandirian keuangan yang dihitung dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan total belanja daerah berpengaruh terhadap *financial distress*. Pemerintah daerah yang mempunyai tingkat kemandirian keuangan yang tinggi maka cenderung tidak akan mengalami financial distress atau pemerintah daerah memiliki kecukupan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kemandirian keuangan mempengaruhi *financial distress*. Kemandirian keuangan yang baik merupakan penentu dari financial distress. Sejalan dengan pandangan teori ketergantungan sumberdaya (Peffer dan Salancik, 1978) bahwa pemerintah daerah yang mampu menguasai sumber daya akan memiliki kekuatan untuk survive dan terhindar dari financial distress

Pramono (2014) rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian,

semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syurmitha (2014) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi (tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat atau daerah) maka tidak akan mengalami financial distress atau mempunyai ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan daerah.

#### **4.5.2 Pengaruh Kontribusi PAD Terhadap *Financial Distress***

Berdasarkan uji regresi logistik menunjukkan bahwa, kontribusi pendapan asli daerah yang dihitung dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah berpengaruh terhadap *financial distress*. Menurut UU No. 32 tahun 2005, tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Albasiah, 2013). Tingginya kontribusi PAD terhadap total pendapatan juga menunjukkan adanya peningkatan pada kemampuan dan kebijakan yang bisa dilakukan oleh daerah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sari (2019) Kontribusi pendapaan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tingkat kekuatan pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk mengurus dan mengatur daerahnya, sehingga pemerintah yang memiliki PAD yang tinggi menunjukkan tingkat derajat desentralisasi yang tinggi dalam mengurus pemerintahannya dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak disamping dana transfer (perimbangan) dalam melakukan kebijakan desentralisasi

Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa organisasi adalah konsekuensi dari kemampuan mereka mempengaruhi, sehingga organisasi yang

hidupnya tergantung pada subsidi pemerintah biasanya akan cenderung lebih taat pada pemerintah (aturan) pemerintah (Syurmita, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yanti (2018), Syurmita (2014), Wicaksono (2015), Sri Husniati dkk (2016) yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap financial distress, pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan cenderung mengalami financial distress. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami kondisi financial distress juga akan semakin kecil.

#### **4.5.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap *Financial Distress***

Berdasarkan uji regresi logistik menunjukkan bahwa, kompleksitas jumlah penduduk yang dihitung menggunakan *logaritma natural* (LN) jumlah penduduk berpengaruh terhadap *financial distress*. Menurut Sari (2019) Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah. jumlah penduduk merupakan sebuah pengukuran kompleksitas suatu daerah, artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat tuntutan layanan publik yang memadai diharapkan oleh masyarakat setempat. Artinya pemerintah daerah dengan penduduk yang lebih besar memiliki probabilitas yang lebih besar untuk mengalami kondisi financial distress.

Berdasarkan Pasal 28 UU No 32 tahun 2004 jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Penduduk yang banyak akan memiliki banyak tuntutan terhadap transparansi serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah karena penduduk dalam kegiatan pemerintahan memiliki peranan penting sebagai pengawas kinerja pemerintah (Mahayani, 2017). Semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah maka semakin banyak pengawas kinerja pemerintah dan akan semakin banyak tuntutan-tuntutan dan kebutuhan penduduk akan fasilitas publik yang memadai untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dari pemerintah, sehingga kemungkinan pemerintah daerah dengan jumlah penduduk yang banyak untuk mengalami kondisi financial distress akan lebih besar dibanding dengan daerah yang jumlah penduduknya

lebih sedikit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Syurmita (2014), Jones and Walker (2007), dan Wicaksono (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap financial distress.

#### **4.5.4 Pengaruh Umur Administratif Terhadap *Financial Distress***

Berdasarkan uji regresi logistik menunjukkan bahwa, umur administratif dihitung berdasarkan umur pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan masing-masing pemerintah daerah berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah daerah yang merupakan hasil pemekaran dan tentunya memiliki umur yang lebih muda dan probabilitasnya untuk mengalami kondisi financial distress lebih besar dibanding daerah yang bukan hasil pemekaran dan memiliki umur yang lebih lama. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah yang bukan merupakan hasil pemekaran mempunyai umur lebih lama dan memiliki kemampuan mengelola pemerintahan yang lebih baik dibanding daerah yang merupakan hasil pemekaran karena umur yang lebih muda dan belum memiliki cukup pengalaman dalam pemerintahan sehingga memiliki kinerja yang lebih buruk sehingga probabilitas mengalami financial distress lebih besar (Sari, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syurmita (2014) dan Pratiwi (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa pemekaran wilayah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Daerah hasil pemekaran dengan umur yang lebih muda maka probabilitas untuk mengalami financial distress akan lebih besar dibandingkan daerah yang sudah lama berdiri atau bukan pemekaran.

#### **4.5.5 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap *Financial Distress***

Berdasarkan uji regresi logistik menunjukkan bahwa, luas wilayah daerah diukur dengan melihat berapa luas wilayah daerah tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Pemerintah daerah yang wilayahnya lebih luas maka probabilitas untuk mengalami financial distress juga akan lebih besar karena pelayanan ataupun

pembangunan yang harus dilakukan juga akan lebih besar dibandingkan daerahnya yang wilayahnya lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk memberikan pelayanan yang memadai dan sesuai standar untuk masyarakat (Sari, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Patrick dan Trussel (2013) yang menyebutkan bahwa financial distress terjadi pada daerah tidak dapat mengembangkan kegiatan ekonomi atau mengalami kemunduran ekonomi. Daerah yang mengalami financial distress akan terus mengalami kondisi tersebut apabila tidak terdapat usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dalam penelitian ini semakin jauh dari ibukota provinsi, maka kemungkinan mengalami financial distress semakin besar karena kegiatan ekonomi berpusat di sekitar ibukota provinsi sehingga menghasilkan PAD yang besar yang dapat menghindarkan dari kemungkinan mengalami financial distress. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress.

#### **4.5.6 Pengaruh Keselarasan Belanja Terhadap *Financial Distress***

Berdasarkan uji regresi logistik menunjukkan bahwa, keselarasan belanja yang dihitung dengan membandingkan antara belanjatidak langsung dengan belanja langsung berpengaruh terhadap *financial distress*. Surplus atau deficit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan

Ritongga et al. (2012) mengatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin baik kemampuan pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya, termasuk belanja daerah yang nantinya akan mendatangkan manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga semakin tinggi nilai dari dimensi budgetary solvency ratio ini maka semakin rendah kemungkinan terjadinya financial distress pemerintah daerah.